



Renovasi Ruang Sidang Dewan Sedot Anggaran Rp 4,3 Miliar

Denpasar (Bali Post) -

Renovasi gedung utama DPRD Denpasar kembali digulirkan tahun ini. Sebelumnya, pada 2013 lalu renovasi sudah sempat dilakukan yang meliputi perbaikan ruang komisi. Kini, renovasi menyasar ruang sidang utama. Kegiatan ini menelan dana Rp 4,3 miliar dari pagu yang dipasang Rp 4,6 miliar. Kini, proses pengerjaan sedang berlangsung.

Pejabat Pembuat Komitmen (Pimpro) proyek renovasi ruang sidang atau interior gedung DPRD Denpasar, Ir. I Gede Cipta Sudewa, M.T., Minggu (17/7) kemarin menyebutkan, proyek tersebut menelan dana Rp 4,3 miliar yang digarap PT Mardika Kriya Prasta. Sedangkan untuk konsultan pengawasnya yakni PT Bikarma menelan anggaran Rp 101,7 juta.

Terkait dengan renovasi ruang sidang tersebut, Ketua DPRD Denpasar I Gusti Ngurah Gede mengatakan, selama proses keg-

iatan renovasi berlangsung maka semua aktivitas persidangan akan dipindah. Sebab, tidak memungkinkan menggunakan ruangan itu untuk sidang paripurna. Karena itu, selama proyek berlangsung, sidang akan dipindah ke ruang aula Gedung Sewaka Dharma, Lumintang. "Kita akan pindah sementara untuk bersidang ke gedung Sewaka Dharma," katanya.

Pengerjaan renovasi ruang sidang dewan ini sempat molor dari jadwal semula. Karena setelah DED-nya rampung, sejumlah anggota dewan terutama di Komisi

III menilai masih ada yang kurang dan perlu mendapat perbaikan. Karena ada usulan seperti itu, tim perencana bersama pimpro proyek ini kembali mengadakan pertemuan dengan Komisi III untuk menyempurnakan gambar. Setelah dilakukan perbaikan, proyek ini mulai dikerjakan per Juli 2016 ini dan diperkirakan akan berakhir Desember 2016 mendatang.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Denpasar I Wayan Maryana Wandira yang ditemui di kantornya mengatakan, pihaknya

sudah sempat mengikuti presentasi dari pihak konsultan perencana. Beberapa rencana yang akan diperbaiki sudah diperlihatkan desainnya. Wandira menyebutkan, ada beberapa usulan yang sempat disampaikan kepada pihak konsultan perencana. Karena dari hasil pemaparan, ia belum melihat ciri khas yang mewakili kedaerahan yakni *bebadungan*. Untuk itu, pihaknya meminta agar dalam melakukan renovasi nanti tetap mengakomodir gaya *bebadungan* yang menjadi ciri khasnya.

Hal senada diungkapkan anggota Komisi III, A.A. Susruta Ngurah Putra. Pihaknya berharap bangunan agar mengakomodir gaya *bebadungan* yang selama ini menjadi ciri khas Denpasar. "Kita sudah mengusulkan agar bangunan yang dibuat nanti tetap

mengedepankan arsitektur lokal, gaya *bebadungan*," katanya.

Sebelumnya, gedung utama ini sudah sempat direnovasi pada akhir 2013 lalu. Renovasi tersebut dianggarkan dengan pagu senilai Rp 3,5 miliar. Renovasi tersebut meliputi ruang-ruang komisi yang ada di lantai satu. Di lantai itu sebelumnya juga ada ruang Sekwan (Sekretaris Dewan) serta bagian keuangan. Namun setelah dibangun gedung di sebelah selatan gedung utama, semua ruang sekretariat termasuk ruang Sekwan dipindah ke gedung yang baru tersebut. (kmb12)



Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391

Edisi : Senin, 18 Juli 2016

Hal : 2



Pemkab Buleleng Angkat Seribu Guru Kontrak

Singaraja (Bali Post) -

Pemkab Buleleng kini mengangkat seribu orang guru kontrak sekolah dasar (SD). Guru kontrak ini diangkat dari 1.301 pelamar. Mereka telah lolos administrasi dan tes wawancara. Sedangkan pengumuman pengangkatan menunggu pengesahan APBD Perubahan 2016. Hal itu disebabkan anggaran untuk membayar guru kontrak itu disepakati dialokasikan dalam APBD Perubahan 2016.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Gede Suyasa di gedung DPRD Buleleng, beberapa waktu lalu mengatakan, dari rencana awal pemerintah mengangkat guru kontrak 600 orang. Anggaran untuk membayar gaji mereka sudah disetujui melalui APBD Induk 2016 yang lalu. Namun dalam perjalanan, muncul desakan dari DPRD Buleleng termasuk kebijakan pemerintah daerah untuk mengangkat seribu guru kontrak sekaligus. Hal ini dilakukan untuk menutup kekurangan guru SD hingga 1.500 orang per tahun.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD langsung menyesuaikan anggaran untuk pengangkatan guru kontrak tersebut. Dari penyesuaian itu disepakati mengalokasikan anggaran dalam APBD Perubahan 2016 sebesar Rp 3,5 miliar.

"Awalnya, kita sudah siapkan anggaran untuk mengangkat 600 orang. Dewan termasuk pemerintah sendiri ingin menambah sehingga disepakati mengangkat seribu orang dengan dukungan anggaran melalui APBD Perubahan tahun ini," ujarnya.

Menurut Suyasa, pengangkatan guru kontrak secara resmi akan diumumkan setelah APBD Perubahan disahkan akhir bulan ini. Dengan demikian, guru kontrak yang diangkat terhitung mulai melaksanakan tugas-tugasnya sejak Juli 2016 dan

seterusnya. Dengan demikian satu bulan mereka akan mendapatkan gaji Rp 1 juta. Dibandingkan dengan guru berstatus PNS dan sudah bersertifikasi, jelas gaji tersebut tidak sebanding. Sementara beban kerja yang diemban oleh guru kontrak tidak jauh beda dengan guru PNS itu sendiri. Pasalnya besaran gaji guru kontrak itu sudah menjadi keputusan pemerintah daerah, sehingga guru harus mengikuti kebijakan itu. Jika kondisi keuangan daerah terus membaik, tidak menutup kemungkinan ada penyesuaian gaji guru kontrak.

"SK akan kita terbitkan setelah APBD Perubahan diketok," jelasnya.

Terkait sisa pelamar yang tidak diangkat sebanyak 301 orang, Suyasa menjelaskan, pemerintah menyerahkan keputusan kepada pelamar yang bersangkutan. Meski demikian, pemerintah menawarkan untuk guru pengabdian yang tidak diangkat, bisa mengajar ke sekolah lain yang membutuhkan dengan status guru pengabdian. Hal ini sangat memungkinkan karena kuota guru kontrak di kecamatan tidak akan seluruhnya terpenuhi.

Suyasa mencontohkan, kecamatan Tejakula, Kecamatan Gerokgak, dan Kecamatan Busungbiu kuota guru kontrak yang diangkat banyak, namun pelamarnya sedikit. Untuk mengisi kekurangan kuota kebutuhan itu menjadi peluang bagi guru pengabdian yang tidak diangkat tahun ini, bisa mengajar ke kecamatan tersebut. "Kalau tidak bersedia mengabdikan ke sekolah lain itu artinya guru pengabdian itu tidak dipakai lagi. Namun harapannya bisa mengabdikan ke sekolah lain karena peluang itu masih terbuka, terutama untuk kecamatan yang kekurangan pelamar," imbuh Kadis asal Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula ini. (kmb38)



Kasus Dugaan Korupsi di BPD Bali Bebas di Tipikor, JPU Verset ke PT

KASUS dugaan korupsi dengan modus *fraud* BPD Bali Cabang Tabanan dengan terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan sudah dihentikan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (15/6) lalu. Namun, itu bukan berarti kasus tersebut berhenti total. Dikonfirmasi atas putusan sela yang mengabulkan eksepsi terdakwa, Kasipenkum Humas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali Ashari Kurniawan, Minggu (17/7) kemarin mengatakan, pihak jaksa penuntut umum (JPU) melakukan perlawanan ke Pengadilan Tinggi (PT) Denpasar. "Kita lakukan verset ke Pengadilan Tinggi," ucap Ashari Kurniawan.

Verset dalam hal ini, JPU melakukan perlawanan atas putusan hakim yang mengabulkan eksepsi terdakwa. Namun, Ashari yang telah berkoordinasi dengan tim JPU mengatakan, hingga saat ini verset yang diajukan belum ada keputusan atau kesimpulannya belum turun dari Pengadilan Tinggi. Di samping mengajukan verset, pihak Kejati Bali juga kembali mengkaji dan menelaah putusan Pengadilan Tipikor Denpasar. "Ini sedang proses. Verset juga belum turun dari Pengadilan Tinggi. Hingga saat ini, kita yakin bahwa indikasi korupsi ada dalam kasus BPD Bali ini," ujar Ashari Kurniawan di sela-sela kegiatan olahraga Hari Bhakti Adyaksa 2006, kemarin.

Sebelumnya diberitakan, untuk pertama kalinya eksepsi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar. Kasus tersebut adalah dugaan korupsi dengan modus *fraud* di BPD Bali Cabang Tabanan dengan terdakwa I Wayan Sukarja Sastrawan. Dalam

putusan sela yang dibacakan majelis hakim pimpinan Achmad Peten Sili dengan hakim anggota Gede Haryadi dan Sumali, Rabu (15/6) lalu, hakim memutuskan mengabulkan eksepsi terdakwa yang diajukan sembilan tim kuasa hukumnya yakni I Putu Gede Darmawan, Agus Gunawan Putra, Ngurah Wirakusuma, dkk. Atas dikabulkannya eksepsi tersebut, otomatis perkara ini tidak dilanjutkan dan dihentikan karena dinilai kasus tersebut bukan masuk ranah pidana korupsi. Dakwaan jaksa pun tidak dilanjutkan alias gugur dalam proses pembuktian.

Dalil majelis hakim mengabulkan eksepsi itu, di antaranya hakim sependapat dengan kuasa hukum terdakwa bahwa dakwaan jaksa kurang cermat, kabur, dan masih ada keragu-raguan soal indikasi kerugian keuangan negara. Atas putusan tersebut, JPU diberikan kesempatan untuk melakukan upaya hukum lain.

Sementara itu, Gede Darmawan didampingi Agus Gunawan Putra mengatakan sangat mengapresiasi putusan majelis hakim yang mengabulkan eksepsi terdakwa. "Majelis hakim sependapat dengan kami. Majelis menerima keberatan yang dituangkan dalam eksepsi kami," ucap Darmawan. Alasannya yakni dakwaan jaksa tidak cermat, tidak teliti sehingga dakwaan jaksa patut dibatalkan. Alasan lain yang digunakan soal kerugian negara. Menurut Darmawan, jaksa masih ragu-ragu menentukan soal kerugian negara, yakni apakah itu (yang dilakukan terdakwa) masuk kategori kerugian negara atau kerugian nasabah secara pribadi. (asa)